

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Eks-Keresidenan Pati merupakan suatu pembagian administrasi dalam provinsi di Jawa Tengah yang terdiri dari beberapa Kabupaten/Kota. Wilayah Eks-Keresidenan Pati terdapat 6 Kabupaten yaitu terdapat Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Grobogan. Dalam ketentuan pasal 216 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah setiap daerah kabupaten memiliki peran penting dalam upaya pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk kesejahteraan negara, seperti dalam bidang ekonomi dimana indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi. Pembangunan adalah syarat terpenting bagi kehidupan suatu negara. Menciptakan pembangunan yang berkelanjutan adalah hal penting yang harus dilakukan oleh sebuah negara dengan tujuan untuk menciptakan kondisi bagi masyarakat untuk dapat menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup sehat, umur panjang dan menjalankan kehidupan yang produktif.<sup>1</sup> Pembangunan yang dapat dilakukan dengan mengetahui kualitas sumber daya manusianya. Dimana SDM merupakan suatu hal yang berperan penting untuk kesejahteraan suatu negara.<sup>2</sup> Cara yang dapat dilakukan dalam kualitas SDM yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah upaya yang diperlukan untuk melihat sukses atau tidaknya suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia memiliki 3 indikator, yaitu angka harapan hidup pada waktu lahir (kesehatan), angka melek huruf

---

<sup>1</sup> Karina Gama Soleha And Ayief Fathurrahman, "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Penanaman Modal Asing (Pma) Dan Penanaman Modal Dalam Negeri (Pmdn) Terhadap Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm)," *Journal Of Economics Research And Social Sciences* 1, No. 1 (2017): 1, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jerss/article/view/9056>.

<sup>2</sup> Jahtu Widya Ningrum, Aziza Hanifa Khairunnisa, And Nurul Huda, "Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Indonesia Tahun 2014-2018 Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, No. 02 (2020): 1.

penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah (pendidikan), dan kemampuan daya beli (pendapatan).<sup>3</sup>

Ketiga indikator tersebut dapat menjadikan peningkatan dalam kualitas sumber daya manusia. Adanya heterogenitas individu, disparitas geografi dan kondisi sosial masyarakat yang bermacam-macam menyebabkan pendapatan tidak menjadi tolak ukur yang utama dalam menghitung tingkat keberhasilan pembangunan hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah dalam menciptakan regulasi bagi tercapainya tertib nasional. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan beberapa kebijakan diantaranya pembangunan pendidikan akan memperhatikan arah ekonomi dimasa yang akan datang, pembangunan kesehatan dengan menanamkan hidup sehat dan memperluas pelayanan kesehatan. Diperuntukan untuk penduduk yang kurang mampu atau miskin diberikan cara berketerampilan praktis dapat menciptakan perilaku produktif dan juga dapat menumbuhkan semangat keswadayaan dan kemandirian untuk bersama-sama meningkatkan taraf hidup atau mengurangi kemiskinan, menekan laju pertumbuhan jumlah penduduk dengan mendorong pelaksanaan gerakan KB, memajukan keseimbangan kepadatan dan sirkulasi penduduk.<sup>4</sup>

Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk menikmati umur panjang, sehat, dan bisa menjalankan kehidupan yang produktif. Jadi tidak mengherankan jika tolok ukur tingkat keberhasilan pembangunan salah satunya bisa dilihat dari sejauh mana nilai kualitas manusianya telah tercapai. Beberapa dimensi pengukuran kualitas hidup manusia antara lain dapat dilihat dari harapan hidup, tingkat kecerdasan dan tingkat kesejahteraan/kemakmuran.<sup>5</sup>

**Tabel 1.1 Nilai IPM Wilayah Eks Keresidenan Pati tahun 2017-2023**

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kudus	73,84	74,58	74,94	75,00	75,16	75,89	76,71
Pati	70,12	70,71	71,35	71,77	72,28	73,14	73,59
Rembang	68,95	69,46	70,15	70,02	70,43	71,00	73,85
Blora	67,52	67,95	68,65	68,84	69,37	69,95	70,63

<sup>3</sup> Adelfina And I Made Jember, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kota Provinsi Bali Periode 2005 – 2013,” *E-Jnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 5, No. 10 (2016): 1012.

<sup>4</sup> Dewi Novita, Yusbar Yusuf, And Rita Yani Iyan, “Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau,” *Jom Fekon* 4, No. 1 (2017): 872.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia 2018. 44-45

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jepara	70,79	71,38	71,88	71,99	72,36	73,15	71,89
Grobogan	68,87	69,32	69,86	69,87	70,41	70,97	71,49

*Sumber BPS Jawa Tengah*

Berdasarkan hasil perhitungan, Nilai IPM di wilayah Eks Keresidenan Pati setiap tahun 2017-2023 selalu bertambah Hal ini disebabkan karena Angka Harapan Hidup Saat Lahir, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran riil perkapita mengalami kenaikan disetiap tahunnya.

Pembangunan yang dilaksanakan di 6 Kabupaten diharapkan memberi dampak positif bagi masyarakat dan sekitarnya, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan kualitas penduduk. Oleh karenanya perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi, salah satunya menggunakan set indikator pembangunan manusia, baik komposit maupun tunggal. Secara komposit adalah dengan melihat angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).<sup>6</sup>

Pembangunan manusia di Indonesia dikhususkan dengan penurunan kemiskinan, jaminan dibidang pendidikan akan lebih berguna untuk penduduk miskin dari pada penduduk yang berkecukupan, karena materi utama penduduk miskin adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang terjangkau akan sangat membantu untuk mengembangkan produktifitas dan pada gilirannya menambah penghasilan. Dengan demikian dapat dibilang pembangunan manusia belum secara optimal dilakukan karena hanya terfokus pada pengurangan kemiskinan.<sup>7</sup>

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi suatu aspek kehidupan meskipun keberadaanya sering tidak di sadari manusia yang mengalaminya. Kemiskinan di kategorikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan primer hidupnya yakni seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kemiskinan akan menghalangi seseorang atau komunitas orang untuk mendapatkan makanan, apalagi makanan bersih, bergizi, juga masalah pendidikan yang bagus dan lingkungan yang bersih. Oleh karena itu tingkat kemiskinan dapat mempengaruhi nilai IPM.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia 2021. 40

<sup>7</sup> Denni Sulistio Mirza, "Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009," *Economics Development Analysis Journal* 1, No. 1 (2012): 2.

<sup>8</sup> Nursiah Chalid And Yusbar Yusuf, "Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kemiskinan memiliki wujud majemuk termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan yang berkesinambungan yaitu : kelaparan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat pendapatan, serta diskriminasi. Kemiskinan juga dicirikan oleh tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang rendah. Kemiskinan memiliki pengertian yang sangat luas dan dalam mengukurnya tidak mudah dilakukan. Kemiskinan absolut didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana pendapatan penduduk atau rumah tangga tidak mencukupi pemenuhan kebutuhan dasar, pendapatannya terlalu rendah sehingga tidak mampu berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi maupun sosial.<sup>9</sup>

Penelitian terdahulu oleh Pangestika dan Widodo yang meneliti hubungan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan mempunyai pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ningrum dkk, melakukan penelitian tentang indeks pembangunan manusia dengan kemiskinan dan Pengangguran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara indeks pembangunan manusia (IPM) dan kemiskinan serta Pengangguran, serta terdapat hubungan yang signifikan antara daya beli dan kemiskinan, apabila kemiskinan dihitung dari presentase penduduk miskin Provinsi terhadap total penduduk setiap provinsi di Indonesia.<sup>11</sup>

Sedangkan Penelitian oleh Denni yang meneliti mengenai hubungan dan pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dimana hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kemiskinan tidak berpengaruh secara signifikan.<sup>12</sup>

---

Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau,” *Jurnal Ekonomi* 22, No. 2 (2014): 3, [Http://Ejournal.Unri.Ac.Id/Index.Php/Je/Article/Viewfile/2592/2547%0a](http://Ejournal.Unri.Ac.Id/Index.Php/Je/Article/Viewfile/2592/2547%0a).

<sup>9</sup> Adelfina And Jember, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kota Provinsi Bali Periode 2005 – 2013.”

<sup>10</sup> Mita Pangestika and Edy Widodo, “Analisis Regresi Panel Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta,” *Seminar Nasional Dan The 4th Call for Syariah Paper*, 2017, 199–205.

<sup>11</sup> Ningrum, Khairunnisa, and Huda, “Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia Tahun 2014-2018 Dalam Perspektif Islam.”

<sup>12</sup> Mirza, “PENGARUH KEMISKINAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI JAWA TENGAH TAHUN 2006-2009.”

Hambatan dari indeks pembangunan manusia sendiri pun tidak lepas dari banyaknya jumlah pengangguran atau tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran merupakan presentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran bisa mempengaruhi indeks pembangunan manusia.<sup>13</sup>

**Tabel 1.2 Presentase Kemiskinan Dan Tingkat Pengangguran di Wilayah Eks Keresidenan Pati Tahun 2017-2022.**

Kabupaten	Tahun	Kemiskinan	Tingkat Pengangguran
Kudus	2017	7,59%	3,56%
	2018	6,98%	3,33%
	2019	6,68%	3,86%
	2020	7,31%	5,53%
	2021	7,60%	3,77%
	2022	7,41%	3,21%
	2023	7,24%	3,25%
Pati	2017	11,38%	3,83%
	2018	9,90%	3,57%
	2019	9,46%	3,64%
	2020	10,08%	4,74%
	2021	10,21%	4,60%
	2022	9,33%	4,45%
	2023	9,31%	4,29%
Rembang	2017	18,35%	3,19%
	2018	15,41%	2,83%
	2019	14,95%	3,60%
	2020	15,60%	4,83%
	2021	15,80%	3,67%
	2022	14,65%	1,76%
	2023	14,17%	2,60%
Blora	2017	13,04%	2,85%
	2018	11,90%	3,30%
	2019	11,32%	3,82%
	2020	11,96%	4,89%
	2021	12,39%	3,81%
	2022	11,53%	3,70%
	2023	11,49%	3,10%

<sup>13</sup> Chalid And Yusuf, “Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau.”

Kabupaten	Tahun	Kemiskinan	Tingkat Pengangguran
Jepara	2017	8,12%	4,84%
	2018	7,00%	3,75%
	2019	6,66%	2,92%
	2020	7,17%	6,70%
	2021	7,44%	4,23%
	2022	6,88%	4,10%
	2023	6,61%	3,35%
Grobogan	2017	13,27%	3,02%
	2018	12,31%	2,22%
	2019	11,77%	3,54%
	2020	12,46%	4,50%
	2021	12,74%	4,38%
	2022	11,80%	4,40%
	2023	11,72%	4,02%

Sumber : BPS Jawa tengah

Data tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan dan tingkat pengangguran 6 kabupaten setiap tahun 2017-2023 mengalami kenaikan dan penurunan. Diantara 6 kabupaten tersebut terdapat 2 kabupaten yaitu kudus dan Pati jumlah kemiskinan dan tingkat pengangguran sedikit. Presestase penduduk miskin dan tingkat pengangguran disebabkan adanya ketidakstabilan yang setiap tahunnya mengalami kenaikan maupun penyusutan. Terjadi penurunan dikarenakan adanya program-program dari pemerintah. Sedangkan kenaikan kemiskinan dan tingkat pengangguran disebabkan karena adanya covid-19, terjadinya ketimpangan distribusi, kesenjangan pembangunan dan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.

Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya, contohnya kriminalitas. Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. Sangatlah tepat jika pemerintah seringkali menjadikan indikator ini sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia 2017. 42

Penelitian terdahulu oleh Baeti, dimana pengangguran berpengaruh signifikan. Hal ini dikarenakan jumlah pengangguran yang tinggi dapat mengurangi kemakmuran hidup masyarakat dengan berkurangnya pendapatan masyarakat menjadi faktor dalam peningkatan IPM.<sup>15</sup>

Penelitian oleh Furqoni dkk menyatakan Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.<sup>16</sup> Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh dewi dan ady yang meneliti hubungan dan pengaruh tingkat pengangguran hasil dari penelitian bahwa tingkat pengangguran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.<sup>17</sup>

Tinggi rendahnya kualitas SDM tidak luput dari peran pemerintah. Dalam pembangunan ekonomi suatu daerah pemerintah memiliki peran yang sangat penting yakni kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal (*Fiscal Policy*) adalah merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan pengeluaran pemerintah dan kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah mobilisasi sumber daya dan penentuan harga barang dan jasa. Besarnya peran pemerintah terhadap pembangunan dapat dilihat dari seberapa besar alokasi anggaran pemerintah yang dikeluarkan untuk meningkatkan pembangunan manusia. Semakin besar anggaran yang dikeluarkan pemerintah maka semakin meningkat kualitas pembangunan manusia. Dengan begitu pengeluaran pemerintah mempunyai keterkaitan dengan IPM yang melalui kebijakan fiskal yakni fasilitas publik seperti pendidikan dan kesehatan.<sup>18</sup>

Pengeluaran pemerintah diduga juga dapat mempengaruhi perkembangan kualitas dari sumber daya manusia tersebut, khususnya di bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Dengan adanya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan kewajibannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia didaerahnya baik dari

---

<sup>15</sup> Nur Baeti et al., “Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011,” *Edaj* 2, no. 3 (2013): 85–98.

<sup>16</sup> Dzaki Furqoni Za And Adi Bhakti, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Tingkat Kemiskinan , Pengeluaran Pemerintah , Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Pembangunan Manusia ( Ipm ) Provinsi-Provinsi Di Sumatera” 8, No. 3 (2019): 182.

<sup>17</sup> Dewi Azizah Meydiasari and Ady Soejoto, “Analisis Pengaruh Distribusi Pendapatan, Tingkat Pengangguran, Dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap IPM Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 01, no. 02 (2017): 123.

<sup>18</sup> Abu Bakar, “Analisis Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika,” *Jurnal Kritis* 4, No. Nomor 2 (2020): 22.

aspek kesehatan, pendidikan dan pendapatan, sehingga partisipasi rakyat dalam pembangunan akan turut serta meningkat.<sup>19</sup>

Menurut penelitian Septiana dkk<sup>20</sup> menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan jumlah penduduk miskin berpengaruh positif terhadap IPM. Meskipun berpengaruh positif pengeluaran pemerintah sektor pendidikan masih berpengaruh kecil terhadap terhadap IPM hal ini menandakan bahwa pengeluaran untuk sektor tersebut belum optimal baik dari penggunaannya dan alokasinya.<sup>21</sup>

Didukung oleh penelitian Baeti<sup>22</sup> juga membuktikan pengeluaran pemerintah khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Jawa Tengah. Di didukung juga oleh penelitian Indrasuara dkk yang dapat membuktikan Belanja Daerah secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Barat. Dengan demikian pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.<sup>23</sup>

**Tabel 1.3 Angka Pengeluaran per Kapita di Wilayah Eks Keresidenan Pati Tahun 2017–2023 (ribuan rupiah).**

Kabupaten	Pengeluaran Perkapita						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kudus	10.639	10.979	11.318	11.16	11.272	11.609	12.088
Pati	9.813	10.19	10.66	10.39	10.506	10.948	11.385
Rembang	9.736	10.191	10.551	10.328	10.519	10.937	11.306
Blora	9.065	9.385	9.795	9.571	9.669	10.067	10.541

<sup>19</sup> Adelfina And Jember, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kota Provinsi Bali Periode 2005 – 2013.”

<sup>20</sup> Septiana M M Sanggelorang, Vekie A Rumate, and F D J Siwu, “PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI SULAWESI UTARA,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15, no. 02 (2015): 3.

<sup>21</sup> Septiana M M Sanggelorang, Vekie A Rumate, And F D J Siwu, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15, No. 02 (2015): 3.

<sup>22</sup> Baeti et al., “Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011.”

<sup>23</sup> Indrasuara Luther Sirangi Si’lang, Zamruddin Hasid, and Priyagus, “Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia,” *Jurnal Manajemen* 11, no. 2 (2019): 166, <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JURNALMANAJEMEN>.

Kabupaten	Pengeluaran Perkapita						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Jejara</b>	9.745	10.169	10.609	10.343	10.536	10.248	11.399
<b>Grobogan</b>	9.716	10.097	10.35	10.221	10.294	10.61	11.083

Sumber BPS Jawa Tengah

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah tahun 2017-2023 pengeluaran bertambah setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 pengeluaran pemerintah berkurang. Hal itu disebabkan karena setiap tahunnya kebutuhan dalam rangka mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah berbeda-beda.

Selain mengoptimalkan kebijakan pengeluaran pemerintah, pendapatan asli daerah juga sangat penting dalam meningkatkan SDM. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan berasal dan di peroleh sendiri dari pemerintah. Sumber dari laba badan milik usaha daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah yang sudah sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam era otonomi daerah seharusnya merupakan basis utama bagi daerah, sehingga ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat melalui pendapatan perimbangan semakin menipis dan pada akhirnya daerah memiliki kemampuan dalam memenuhi segala kebutuhannya terkait dengan prosedur pelayanan publik. Sedangkan menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 bahwa PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang diambil berdasarkan peraturan daerah yang sudah tertera dengan peraturan perundang-undangan, yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang telah dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.<sup>24</sup>

Besaran PAD dapat dijadikan tolak ukur seberapa besar kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya. Penerimaan daerah yang bersumber dari PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah selain untuk mendanai belanja rutin, sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Peningkatan kualitas pelayanan publik tentunya akan berdampak pada semakin sejahteranya masyarakat dan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Edi Yanto And Vitayanti Fattah, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah ( Pad ) Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia ( Ipm ) ( Survei Pada Kabupaten / Kota Di Sulawesi Tengah ),” *Jurnal Katalogis* 6, No. 2 (2018): 125.

<sup>25</sup> Putu Gde Mahendra Putra And I Gusti Ketut Agung Ulupui, “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 11, No. 3 (2015): 865.

Menurut UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi tujuh jenis pendapatan, yaitu Pajak Daerah dipisahkan menjadi dua jenis yang terdiri dari : 1). Pajak Kabupaten/Kota, 2). Pajak Provinsi. Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

PAD diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap daerah memiliki PAD yang berbeda-beda karena potensi yang dimiliki setiap daerah berbeda. Semakin tingginya PAD suatu daerah cenderung dapat mengurangi tingkat ketergantungan daerah terhadap dana alokasi umum (DAU) atau dana alokasi khusus (DAK) yang diberikan oleh pemerintah pusat, sesuai dengan undang-undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Penentuan pajak untuk PAD ditentukan sendiri oleh daerah yang bersangkutan, namun masih sesuai dengan ketentuan undang-undang. Obyek pajak dan retribusi daerah sangat menentukan jumlah PAD, sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat apabila PAD meningkat dan kesejahteraan masyarakat daerah meningkat.<sup>26</sup>

Didukung penelitian oleh Edi dkk, yang menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. PAD akan mempengaruhi pembangunan di daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas dan infrastruktur yang ditujukan untuk kepentingan publik, sehingga hal ini akan meningkatkan alokasi belanja modal dan

---

<sup>26</sup> I Gusti Ngurah Putu Teguh Pratama And I Negah Kartika, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah ( Pad ) Dan Silpa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia ( Ipm ) Melalui Belanja Modal Di Provinsi Bali," *E-Jurnal Ep Unud* 6, No. 11 (2017): 2233.

mempengaruhi peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).<sup>27</sup> Sedangkan penelitian yang dilakukan Edy dkk menyatakan bahwa variabel PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.<sup>28</sup>

**Tabel 1.4 Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Eks Keresidenan Pati pada Tahun 2017-2022 (ribu rupiah).**

Kabupaten	Tahun	PAD
Kudus	2017	366.031,21
	2018	337.364,61
	2019	343.823,56
	2020	383.884,19
	2021	507.762,04
	2022	412.612,34
	2023	502.312,79
Pati	2017	428.374,750
	2018	383.912,843
	2019	326.366,340
	2020	351.859,894
	2021	388.644.537,358
	2022	362.814,604
	2023	352.216,771
Rembang	2017	318.049,266
	2018	305.676,436
	2019	291.855,438
	2020	307.258,622
	2021	404.100.646,579
	2022	373.771,127
	2023	341.472,514
Blora	2017	280.047,450
	2018	203.166,113
	2019	264.338,953
	2020	236.965,596
	2021	326.770.477,077
	2022	291.111,176
	2023	223.749,971

<sup>27</sup> Yanto And Fattah, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah ( Pad ) Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia ( Ipm ) ( Survei Pada Kabupaten / Kota Di Sulawesi Tengah ).”

<sup>28</sup> Edy Sahlan, Yusuf Yusuf, and Dodo Susanto, “Pengaruh Pendataan Asli Daerah (Pad) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm),” *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 4, no. 1 (2022): 18, <https://doi.org/10.58258/jihad.v4i1.4592>.

Kabupaten	Tahun	PAD
Jepara	2017	331.060.969
	2018	369.330.455
	2019	359.893.706
	2020	386.441.887
	2021	408.635.274,883
	2022	409.055.622
	2023	445.914.894
Grobogan	2017	440.456.236
	2018	315.743.176
	2019	319.425.017
	2020	332.001.228
	2021	424.186.340.226
	2022	349.216.210
	2023	398.496.245

*Sumber BPS Jawa Tengah*

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun ketahun pendapatan asli daerah Kudus semakin meningkat dikarenakan PAD akan mempengaruhi pembangunan di daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas dan infrastruktur yang ditujukan untuk kepentingan publik, sehingga hal ini akan meningkatkan alokasi belanja modal dan mempengaruhi peningkatan indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya terdapat hasil yang tidak konsisten sehingga membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menguji secara empiris Oleh karena itu, untuk memperkuat penelitian sebelumnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah, Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Eks Keresidenan Pati Tahun 2017-2023**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Kemiskinan berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Eks Keresidenan Pati tahun 2017-2023?

2. Apakah Tingkat Pengangguran berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Eks Keresidenan Pati tahun 2017-2023?
3. Apakah Pengeluaran berpengaruh Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Eks Keresidenan Pati tahun 2017-2023?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Eks Keresidenan Pati tahun 2017-2023?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui Pengaruh Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Eks Keresidenan Pati tahun 2017-2023
2. Mengetahui Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Eks Keresidenan Pati tahun 2017-2023
3. Mengetahui Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Eks Keresidenan Pati tahun 2017-2023
4. Mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Eks Keresidenan Pati tahun 2017-2023.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini apat memberi manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi, gambaran serta disiplin ilmu tentang pengaruh kemiskinan, tingkat pengangguran, pengeluaran pemerintah, pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Wilayah Eks Keresidenan Pati tahun 2017-2023.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan dapat dijadikan masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan untuk pembangunan manusia dibidang ekonomi ataupun pendapatan daerah di masa yang akan datang serta memberi pemahaman inovasi dalam melakukan penelitian.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini di susun guna mengetahui susunan tiap bab dalam penelitian serta dapat memudahkan dalam memahami

deskripsi lengkap tentang penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun per bab dan setiap bab memiliki sub-bab sebagai perinciannya. Hal ini bertujuan agar pembahasan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas. adapun sistematika penulisan penelitian ini terdiri atas :

1. Bagian awal, terdiri atas cover yang berisi judul, nota persetujuan bimbingan, surat pernyataan, motto, persembahan, abstrak, dan daftar isi.
2. Bagian isi, terdiri dari 5 bab. Masing-masing bab terdiri atas sub-sub bab, susunan masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini memuat konsep-konsep serta teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diangkat yakni tentang pengaruh kemiskinan, tingkat pengangguran, pengeluaran pemerintah, pendapatan asli desa, penelitian terdahulu, yang sejenis dan kerangka berfikir.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, dimulai dengan objek penelitian, pendekatan penelitian definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data dan analisis.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada bab ini berisi mengenai gambaran objek penelitian, analisis data, serta pembahasan.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini terdiri atas kesimpulan sebagai hasil akhir terhadap permasalahan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah sebelumnya. Kemudian saran dan masukan yang sifatnya konstruktif berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dan penelitian yang akan datang mengenai tema dan permasalahan yang sama serta menjadi penutup pembahasan.

3. Bagian akhir, memuat lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup peneliti.